

## **BAB 3**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **3.1 Gambaran Perekonomian Kota Payakumbuh.**

Dengan digulirkan dan dilaksanakannya berbagai kebijakan untuk menghadapi era otonomi daerah yang dicanangkan semenjak tahun 2000, sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, serta Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, ternyata telah membawa perekonomian Kota Payakumbuh ke arah yang lebih baik, setelah sempat mengalami keterpurukan ekonomi akibat krisis ekonomi pada tahun 1998.

Kota Payakumbuh memiliki luas wilayah 80,43 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 104.969 jiwa (keadaan tahun 2007). Dilihat dari pembangunan ekonomi wilayah Payakumbuh mempunyai karakteristik sebagai kota jasa dan perdagangan yang ditopang oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari komposisi distribusi PDRB yang didominasi oleh sektor jasa. Dalam perkembangannya Kota Payakumbuh terus mengalami perbaikan ekonomi dari tahun ketahun.

Membaiknya kondisi perekonomian dapat dilihat dari peningkatan PDRB kota selama lima tahun terakhir (tahun 2002-2006), baik atas dasar harga konstan tahun 2000 maupun atas dasar harga berlaku. Kondisi ini sekaligus juga mengindikasikan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berjalan dan berhasil dengan baik. Prestasi ekonomi ini juga tidak terlepas dari dukungan kondisi sosial, politik dan keamanan yang semakin kondusif selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini. Lapangan usaha angkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang paling tinggi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 8,05%, posisi kedua ditempati oleh lapangan usaha listrik, gas dan air minum, kemudian diikuti oleh lapangan usaha bangunan.

Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian kota bergerak secara dinamis dengan tingkat pembangunan fisik yang cukup tinggi.

**Tabel 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2002-2006**

No.	Lapangan usaha	Pertumbuhan (%)					Rata-rata
		2002	2003	2004	2005	2006	
1.	Pertanian	4,82	4,56	5,19	4,15	4,04	<b>4,55</b>
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,79	5,35	5,80	4,77	3,92	<b>4,93</b>
3.	Industri	5,52	4,85	5,21	6,19	6,31	<b>5,62</b>
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	8,54	5,38	6,02	5,96	5,36	<b>5,89</b>
5.	Bangunan	7,36	6,47	5,45	4,97	4,60	<b>5,77</b>
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	4,24	5,43	4,74	4,82	4,86	<b>4,82</b>
7.	Angkutan dan Komunikasi	5,21	5,70	9,03	9,90	10,39	<b>8,05</b>
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,14	3,05	5,61	5,41	6,78	<b>5,20</b>
9.	Jasa-jasa	3,71	5,24	4,06	4,38	5,02	<b>4,48</b>
	<b>PDRB</b>	<b>4,80</b>	<b>5,13</b>	<b>5,61</b>	<b>5,78</b>	<b>6,18</b>	<b>5,67</b>

Sumber: PDRB Kota Payakumbuh, 2008

Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi saja belum mampu mencerminkan peningkatan dalam kesejahteraan bagi masyarakat, meskipun jika dilihat dari perkembangan pendapatan perkapita masyarakat Kota Payakumbuh juga terjadi peningkatan nilai secara nominal, namun ini belum cukup untuk memperlihatkan keberhasilan pembangunan kota. Indikator penting lainnya yang harus diperhatikan adalah apakah peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh kemampuan daya serap terhadap tenaga kerja sehingga semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, baik di lapangan kerja formal maupun informal, yang pada akhirnya akan semakin menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota ini.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan**  
**usaha Tahun 2003-2006**

No	Lapangan Usaha	2003		2004		2005		2006*		Pertumbuhan (%)
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1.	Pertanian	8.765	21,7	9.187	21,25	9.340	22,46	8.972	21,25	<b>0,78</b>
2.	Pertambangan & penggalian	418	1,35	462	1,07	204	0,49	275	0,65	<b>0,90</b>
3.	Industri	4.174	10,34	5.834	12,61	5.998	12,70	6.126	12,89	<b>0,85</b>
4.	Listrik, gas & air minum	196	0,48	153	0,35	52	0,13	81	0,19	<b>(25,51)</b>
5.	Bangunan & Konstruksi	1.751	3,34	2.402	5,57	1.843	4,43	1.749	4,14	<b>(0,04)</b>
6.	Perdagangan	13.256	32,83	13.230	30,60	13.809	33,21	14.022	33,20	<b>1,89</b>
7.	Angkutan & Komunikasi	2.713	6,72	4.182	9,67	3.188	7,67	3.270	7,74	<b>6,42</b>
8.	Keuangan	560	1,39	354	0,82	672	1,62	945	2,24	<b>19,06</b>
9.	Jasa-jasa	8.549	20,95	7.808	18,06	9.746	23,44	10.057	23,82	<b>5,56</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>40.382</b>	<b>100</b>	<b>43.231</b>	<b>100</b>	<b>41.577</b>	<b>100</b>	<b>42.230</b>	<b>100</b>	<b>1,50</b>

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2008

Ket : \* Bappeda Kota Payakumbuh (data diolah)

(---) nilai negatif

Jika dilihat dari tingkat rata-rata pertumbuhan, maka tampak bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata penyerapan tenaga kerja Kota Payakumbuh selama 4 tahun sebesar 1,5%, meski lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk, tetapi angka ini masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kemampuan laju pertumbuhan ekonomi secara rata-rata yang mencapai angka 5,6%.

Lapangan usaha yang pertumbuhan penyerapan tenaga kerja paling tinggi adalah lapangan usaha jasa keuangan, meskipun secara kontribusi nilai perannya masih kecil, yaitu sebesar 2,24% pada tahun 2006. Sementara penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian sudah sangat kecil, hal ini memperlihatkan bahwa lapangan usaha ini mulai jenuh dan sudah berkurang kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, ada dua lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan daya serap terhadap tenaga kerja dengan nilai negatif, artinya telah terjadi penurunan penggunaan tenaga kerja selama empat tahun terakhir, yaitu lapangan listrik, gas dan air minum; dan lapangan usaha bangunan & konstruksi. Kondisi ini harus mendapat perhatian pemerintah kota, karena ketiga lapangan usaha ini ternyata memberikan kontribusi yang selalu meningkat pada PDRB kota. Hal ini mengisyaratkan bahwa peningkatan nilai produksi lapangan usaha ini tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang diharapkan dapat mendorong percepatan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor industri rata-rata hanya sebesar 0,85% pertahun. Lambatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri disebabkan oleh banyaknya kendala yang dimiliki oleh pengusaha skala kecil dan mikro dalam hal sebagai berikut :

- Kendala Internal, yang meliputi:
  - Kendala dalam memperoleh informasi pasar.
  - Keterbatasan dalam pemanfaatan dan penguasaan teknologi.
  - Keterbatasan jaringan usaha dan kerjasama usaha.
  - Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen.
  - Kelemahan dalam struktur permodalan
- Kendala eksternal, diantaranya adalah:
  - Iklim persaingan yang belum sehat.
  - Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai.
  - Pembinaan yang masih kurang terpadu.
  - Image bahwa IKM kurang menguntungkan Investor

Berdasarkan data Statistik Sumatera Barat, pada tahun 2006 di Kota Payakumbuh terdapat 14.925 unit usaha, dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap sebanyak 30.534 orang, dimana 5.779 unit merupakan usaha yang berlokasi di tempat tidak permanen, dan 9.146 unit adalah usaha yang berlokasi

di tempat permanen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih cukup besar jumlah UKM yang berada di sektor informal, yang tentunya membutuhkan perhatian pemerintah daerah untuk pengembangan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Kota Payakumbuh sektor industri ini dinilai berpotensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Karena kontribusi yang diberikan oleh usaha pada umumnya tergolong usaha rumah tangga, Usaha mikro kecil, dan menengah yang ternyata banyak dikelola masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan UKM tersebut, agar potensi tersebut bisa direalisasikan.

### **3.2 Badan Layanan Umum Daerah ((BLUD)).**

Landasan hukum Badan Layanan Umum adalah Undang-Undang No. 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Statusnya adalah bukan badan hukum, merupakan instansi pemerintah, pegawainya adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), sumber keuangan adalah negara, tujuan usaha adalah tidak mengutamakan laba dibawah menteri teknis terkait dan bersifat pelayanan kepada masyarakat.

Ciri lain dari Badan Layanan Umum adalah dapat menggunakan hasil penerimaan jasa/barang untuk operasional Badan, adanya prinsip efisiensi dan produktivitas, tidak dapat mengambil kebijakan sendiri karena ada pembinaan teknis dan sebatas dalam memberikan layanan teknis saja. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Undang – undang dan Peraturan Pemerintah tersebut serta esensi pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai amanat koor Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2008-2012, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh modal usaha guna meningkatkan produksi dan pendapatan, maka Pemerintah Kota melahirkan program Dana Bergulir Mikro. Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik Program ini dibentuk

dalam suatu wadah yaitu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2009.

Pada awalnya, BLUD Dana bergulir mikro ini merupakan Badan Pengelola Dana Bergulir (BPBD), badan ini dibentuk untuk menekan maraknya pertumbuhan praktek-praktek rentenir, yang merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan UMKM di Kota Payakumbuh. Modalnya dari APBD dalam bentuk penyertaan modal, dimana sampai tahun 2007 mencapai Rp. 19.422.362.712,-. Dengan dana yang beredar di masyarakat sebesar Rp. 14.658.516.706,- dan pendapatan jasa sebesar Rp. 1.368.218.919,-. Jumlah nasabah sampai tahun 2007 sebanyak 3.097 orang yang sebagian besar bergerak dibidang usaha industri perdagangan sebesar 58%, peternakan 11%, pertanian 6% dan koperasi 25%.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diisyaratkan bahwa setiap pemerintah daerah di daerah yang menyelenggarakan pelayanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat, baik dibidang pelayanan jasa kesehatan maupun dana bergulir untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diwajibkan menyesuaikan dan menerapkan Pola Pengelolaan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor : 61 tahun 2007 ini paling lambat sampai tahun 2009.

Adapun yang menjadi dasar hukum pembentukan BLUD Dana Bergulir Kota Payakumbuh adalah :

1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bergulir pada kementerian Negara/Lembaga

5. Peraturan Walikota Payakumbuh No. 14 tahun 2008 tentang BLUD Dana Bergulir Usaha Mikro Kota Payakumbuh.

Berdasarkan dasar hukum tersebut berubahlah BPBD tersebut menjadi BLUD dana bergulir usaha mikro pada tahun 2008. Dimana secara substantif BLUD dana bergulir mikro merupakan BLUD pada unit kerja yaitu Unit Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, dengan pengelola administrasi pada Bagian Perekonomian karena fungsinya sebagai pelaksana unsur pelayanan. Dengan lingkup kerja BLUD dana bergulir mikro memiliki lingkup kerja pemberian pinjaman dari berbagai sektor usaha antara lain Industri dan dagang, pertanian, peternakan, jasa, dan koperasi. Tetapi status BLUD ini masih bertahap, artinya belum BLUD penuh, kedepan akan ditingkatkan statusnya menjadi BLUD penuh.

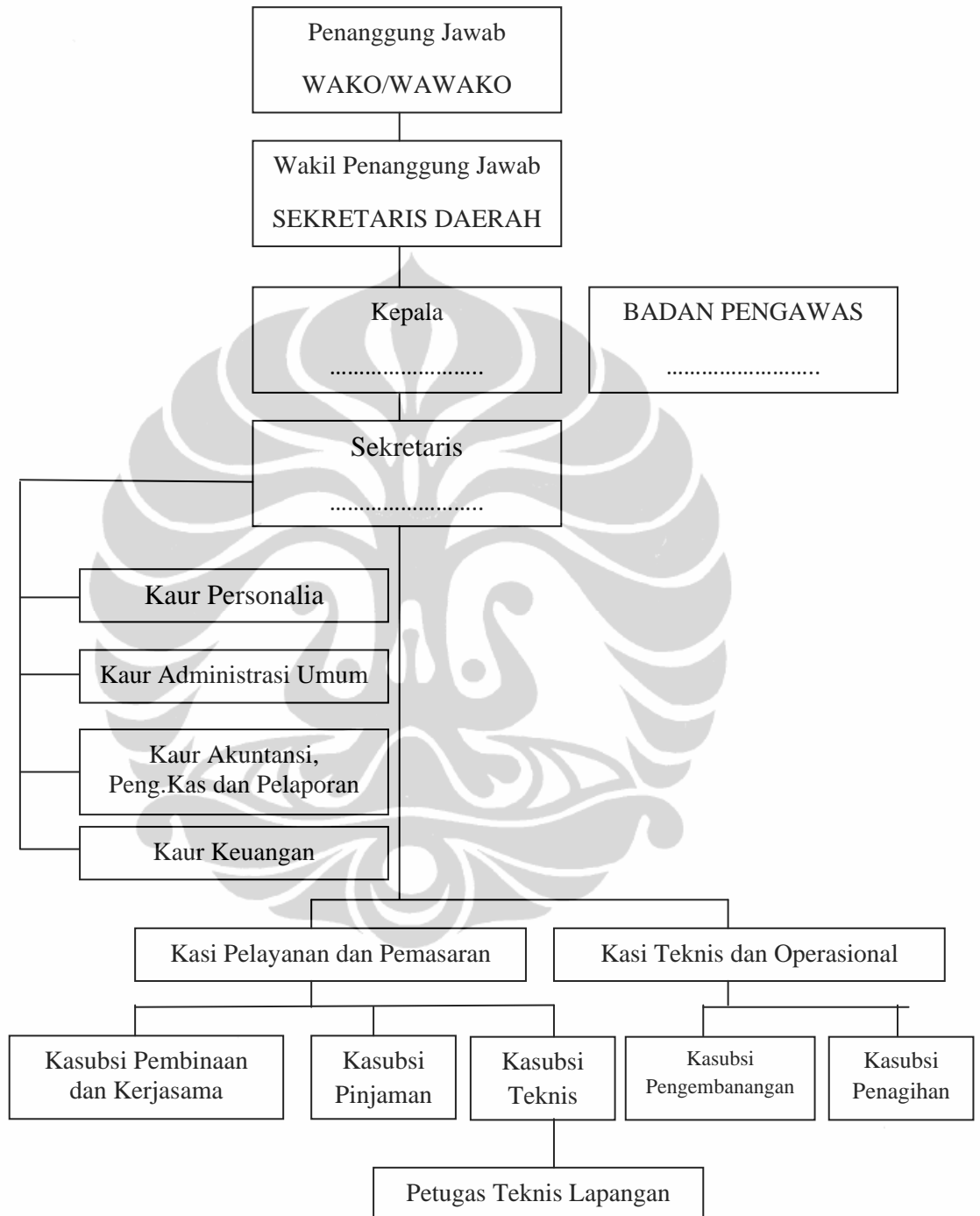
Secara administrasi Pejabat Pengelola BLUD Dana Bergulir terdiri dari :

1. Dikoordinir oleh seorang pimpinan dan dibantu seorang sekretaris, kepala seksi pelayanan /pemasaran, kepala seksi teknis dan operasional, kepala seksi keuangan yang dibantu bendaharawan dan kasir, petugas administrasi dan pelaporan.
2. Operasional dan penetapan pinjaman, dibantu 16 orang petugas teknis lapangan dibawah naungan dinas teknis, yakni Dinas Koperasi, UMKM Perindag dan Dinas Pertanian.
3. Personil pengelola administrasi, 7 (tujuh ) orang unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 (enam) orang karyawan.

Dimana Struktur organisasi dapat kita lihat pada bagan pada halaman setelah ini.

## Struktur Organisasi BLUD Penyaluran Dana Bergulir Mikro

### Kota Payakumbuh



**Gambar 3.1**

Sumber : Perwako No. 14 Tahun 2008



Dana tersebut di salurkan ke masyarakat dengan syarat sebagai berikut :

1. Warga Kota Payakumbuh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Mempunyai usaha yang sedang berjalan
3. Tidak mempunyai ikatan utang dengan pihak pemberi pinjaman lain
4. Rekomendasi dari kelurahan setempat
5. Bukan pegawai negeri sipil
6. Bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dengan bidang usaha yang difasilitasi sebagai berikut :

- **Industri**  
Fasilitas pinjaman lebih diutamakan untuk membantu permodalan usaha bagi pelaku industri rumah tangga yang mengelola bahan baku menjadi bahan jadi dari produk-produk unggulan daerah seperti usaha makanan ringan, aneka olahan produk ternak (rendang) dan industri rumah tangga lainnya secara langsung mampu menyerap tenaga kerja lokal. Kelancaran pemasaran usaha menjadi patokan utama dan memberikan kelayakan bagi petugas teknis untuk ditetapkan menjadi rekomendasi dinas teknis.
- **Kerajinan**  
Usaha yang diutamakan adalah usaha kerajinan rakyat yang memanfaatkan bahan baku dalam daerah. Mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam upaya mengurangi kemungkinan terjadi penambahan pengangguran. Diantaranya usaha kerajinan yang difasilitasi permodalannya adalah kerajinan dari bahan baku bambu, kayu maupun porselin.
- **Pertanian**  
Komoditas tanaman pangan yang menjadi skala prioritas adalah membantu permodalan bagi usaha-usaha produk unggulan daerah. Bentuknya komoditi padi, sayuran, palawija dan hortikultura serta wadah pengolahan seperti huller dan wadah pemasaran seperti pengumpul produksi. Komoditi unggulan daerah antara lain usaha tanaman padi, mentimun, terung, kacang panjang dan sayuran dataran rendah lainnya. Sistem pinjaman tetap berlaku seperti pinjaman lainnya dengan cicilan bulanan.

- Peternakan

Komoditi ternak yang difasilitasi adalah ternak budi daya. Khusus ternak sapi (bibit dan kreman) sudah menjadi program khusus dinas teknis. Diantara jenis usaha untuk pinjaman modal komoditas ternak antara lain permodalan untuk usaha ternak ayam ras, ayam buras, ternak puyuh, ternak itik dan ternak kambing. Cicilan pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan surat perjanjian. BLUD tidak melayani dan memberikan pinjaman kepada peternak pemula atau masyarakat yang akan berusaha ternak.

- Koperasi

Koperasi yang difasilitasi dalam kegiatannya, anggota koperasi melaksanakan usaha-usaha mikro dan kecil. Pinjaman modal usaha yang diberikan dalam bentuk pemupukan modal koperasi dan pemberdayaan anggota.

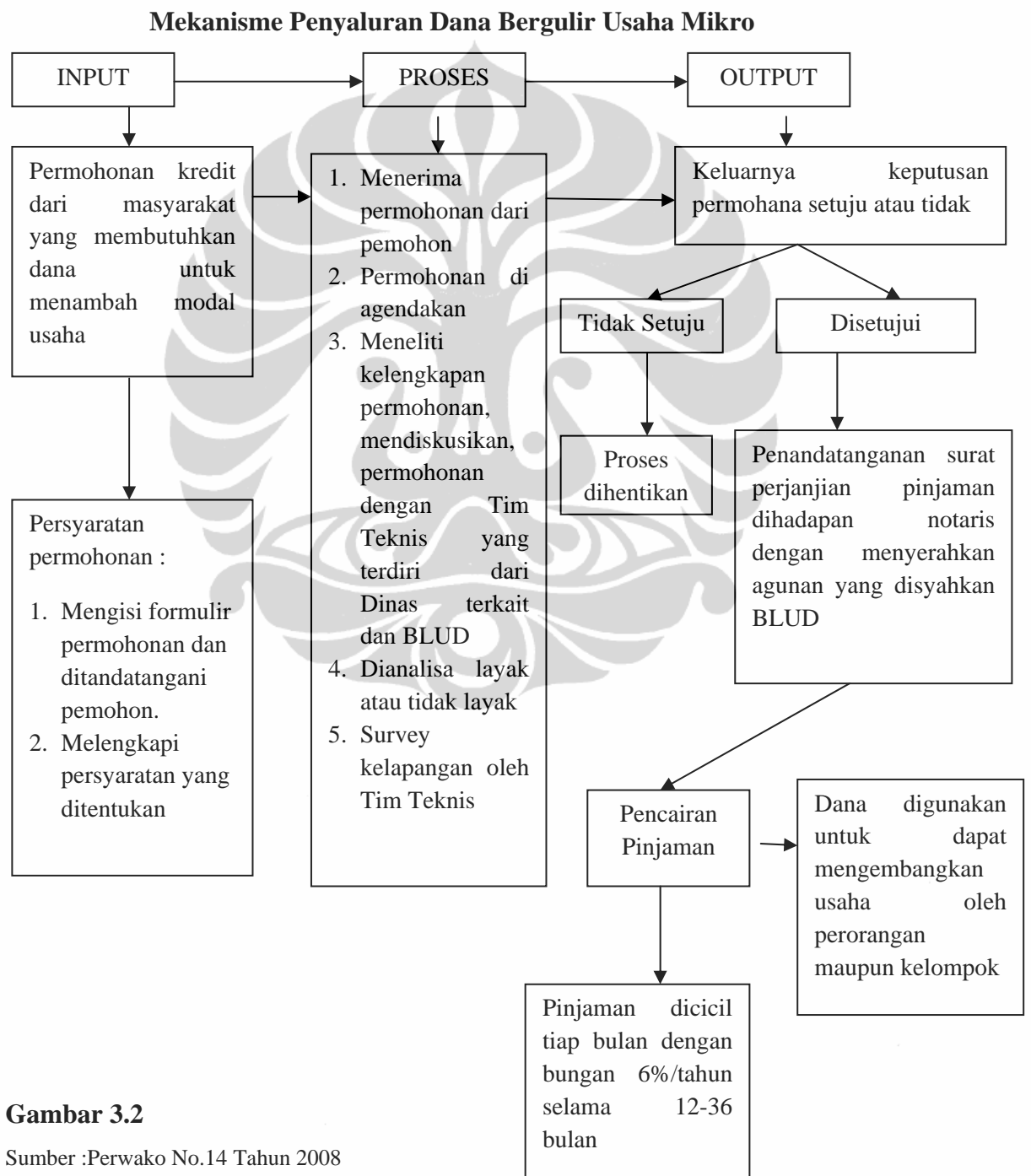
Penyaluran Dana Bergulir dilaksanakan dengan sistem pelaksana kegiatan (*executing*) dimana BLUD Dana Bergulir bertindak sebagai pengelola kegiatan penyaluran kredit dan menampung resiko atas kredit yang disalurkan serta menerima imbalan berupa jasa layanan, dimana pelayanan dilakukan dengan membuat ikatan perjanjian antara usaha kecil dan mikro yang ditentukan oleh BLUD Dana Bergulir. Piutang diberikan minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan jangka waktu pengembalian maksimal 36 bulan.

Berbeda dengan program penyaluran dana bergulir pada umumnya, BLUD dana bergulir menggunakan agunan sebagai jaminan pinjaman nasabah. Hal ini bukan bermaksud memberatkan kepada nasabah, tetapi adalah untuk memberikan tanggung jawab dan rasa memiliki bagi nasabah dana bergulir, sehingga nasabah sadar untuk melakukan pengembalian pinjaman dengan tepat waktu. Aturan ini dipakai juga diperbolehkan, sebagaimana terdapat dalam Permenkeu nomor 99 tentang Pedoman pengelolaan Dana bergulir pada kementerian/lembaga dan Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Badan layanan Umum.

BLUD Dana Bergulir juga memiliki mekanisme penyelesaian masalah, bekerjasama dengan pihak lain, melakukan sistim pelayanan minimal, serta memperoleh laba usaha. Dimana laba usaha tersebut akan digunakan untuk :

1. 60% untuk penambahan dana BLUD Dana Bergulir.
2. 30% untuk Pendapatan Asli Daerah,
3. 6% untuk dana sosial kemasyarakatan,
4. 4% untuk peningkatan sumber Daya Manusia.

Berikut adalah gambar mekanisme penyaluran dana bergulir BLUD Kota Payakumbuh.



**Gambar 3.2**

Sumber :Perwako No.14 Tahun 2008

Dengan demikian BLUD terus menggulirkan dana sehingga telah dapat memperoleh jasa usahanya dan surplus. Di mana menurut laporan BLUD Tahun 2010 Surplus yang diperoleh dari tahun 2003 sampai dengan 2009 adalah sejumlah Rp. 2.482.082.195,- (Dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah). Yang nantinya menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh. Dengan rincian seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Kondisi surplus BLUD Dana Bergulir Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2003 s/d 2009**

No.	Surplus Tahun	Jumlah (Rp.)
1.	2003	9.668.610,-
2.	2004	47.442.128,-
3.	2005	55.260.482,-
4.	2006	463.628.372,-
5.	2007	504.801.629,-
6.	2008	741.966.057,-
7.	2009	659.314.917,-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.482.082.195,-</b>

Sumber : Laporan Keuangan BLUD Dana Bergulir Usaha Mikro Tahun 2010

Sehingga sampai akhir tahun 2009 jumlah kekayaan (ekuitas) BLUD dana bergulir adalah sebesar Rp. 21.980.411.985,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dikurangi pajak dan kewajiban sosial lainnya sebanyak Rp. 77.825.172,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Dengan demikian diharapkan dengan adanya BLUD dana bergulir ini akan mampu mendukung upaya peningkatan dan perkembangan sektor industri skala kecil dan mikro. Sehingga dengan berkembangnya sektor industri akan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat nantinya.

## BAB 4

### METODE PENELITIAN

#### 4.1 Pendekatan Penelitian.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dipakai untuk melihat dampak pendapatan pengusaha industri kecil dan mikro. Kualitatif dipakai untuk melihat pelaksanaan kinerja program penyaluran dana bergulir mikro oleh Badan Layanan Umum Daerah Kota Payakumbuh.

Sesuai salah satu kriteria persyaratan usaha untuk memperoleh kredit dana bergulir mikro adalah jenis usahanya adalah industri, kerajinan, peternakan, pertanian dan koperasi. Usaha industri cukup banyak berkembang di kota Payakumbuh dan menurut data propinsi Sumatera Barat salah satu produk unggulan kota Payakumbuh adalah pengolahan makanan ringan, dan menurut data Dinas Koperindag Produksi terbesar pada tahun 2009 juga dihasilkan oleh Industri makanan ringan tersebut. Jenis industri ini tergolong kepada Jenis Industri Pangan, dimana sampai tahun 2009 telah menyerap 1.878 tenaga kerja dari 542 unit usaha.

Untuk itu penelitian disini akan dibatasi sampai kepada penerima kredit sektor usaha skala kecil industri dan mikro saja, karena sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan secara teori sektor industri dapat lebih mendorong proses pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, peningkatan produktivitas, penciptaan tenaga kerja terlatih dan pengembangan sektor pertanian dan jasa.

#### 4.2 Jenis Dan Sumber Data.

Jenis data yang akan digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian disini adalah pengusaha Industri mikro penerima kredit dana bergulir, objeknya adalah pendapatan pengusaha tersebut. Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung (*field research*) dengan melakukan wawancara terhadap respondendan memberikan daftar pertanyaan (kusioner) yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data sekunder diperoleh dari literatur hasil penelitian sebelumnya, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai pengelola program dana bergulir mikro, bagian perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh, BPS Kota Payakumbuh dan Bappeda Kota Payakumbuh serta Dinas terkait yang dirasa perlu.

### **4.3 Metode Pemilihan Sampel.**

Metode pemilihan sampel adalah dengan metode *purposive sampling* yaitu metode penarikan sampel dimana responden dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian. Jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 30 orang dari 64 orang pengusaha sektor pangan dari total 110 orang populasi pengusaha tergolong industri skala kecil dan mikro dari tahun 2003-2009 yang memperoleh kredit dana bergulir mikro tahun 2008-2009.

Sampel tersebut akan didata berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengenai data nasabah yang diinginkan peneliti, dimana akan dikelompokkan berdasarkan jenis usaha serta tahun peminjaman. Sampel di ambil berdasarkan kriteria yaitu : usaha yang digeluti adalah bidang industri skala kecil dan mikro, sektor pangan, lokasi di Kota Payakumbuh, realisasi pinjaman tahun 2008-2009, pinjaman dari BLUD baru pertama kali.

### **4.4 Teknik Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi dengan instrumen daftar pertanyaan (kuisiner) kepada sampel yang telah ditentukan. Berbekal daftar pertanyaan tersebut peneliti akan dapat memperoleh data yang diinginkan kemudian dilanjutkan dengan *in depth interview* terhadap responden tersebut guna menggali informasi yang tidak terdapat dalam kuisiner.

### **4.5 Metode Analisa Data.**

#### **4.5.1 Uji Beda Dua rata rata.**

Untuk melihat peningkatan pendapatan pengusaha sektor industry digunakan teknik analisa dengan membandingkan antar kelompok seperti *T-test*, maka jumlah sampel untuk setiap sel dalam rancangan analisa harus 30 kasus

(Singarimbun :1989). Pada penelitian ini digunakan 30 kasus untuk pendapatan sebelum memperoleh dana bergulir mikro, 30 kasus untuk pendapatan sesudah memperoleh dana bergulir mikro, karena pengujian yang dilakukan adalah pengujian *t-test*.

Untuk menguji dampak sesudah dan sebelum memperoleh kredit dana bergulir mikro terhadap pendapatan pengusaha mikro dilakukan uji beda dua rata rata atau dikenal dengan *Paired sample T-test* yaitu pengujian yang dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan disini dapat diartikan sebagai subyek yang sama, yaitu pengusaha industri pangan skala kecil dan mikro yang mengalami dua perlakuan yang berbeda, yaitu pendapatan sebelum memperoleh dana bergulir mikro dan sesudah memperoleh dana bergulir mikro.

Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan bantuan *software SPSS 13.00 for window*, sehingga akan diperoleh hasil yang diinginkan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$H_0$  : pendapatan tidak meningkat setelah memperoleh dana bergulir.

$H_1$  : pendapatan meningkat setelah memperoleh dana bergulir.

Hasil perhitungan dibandingkan dengan tabel t, pada tingkat  $\alpha = 5\%$ , dengan pengujian dua sisi. Tolak  $H_0$  jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, artinya pendapatan meningkat setelah menerima kredit dana bergulir usaha mikro. Sebaliknya terima  $H_0$  jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel, artinya tidak ada perbedaan atau peningkatan pendapatan setelah menerima kredit dana bergulir usaha mikro.

#### 4.5.2 Kerangka Kerja Logis (KKL).

Kerangka logis (*logframe*) adalah sebuah jabaran yang memudahkan dalam perencanaan dimana disini ditetapkan target dengan memakai pendekatan strategik yang merupakan daftar keinginan perencana sebagai cerminan dari keinginan organisasi. Membuat kerangka kerja logis dapat dipermudah dengan membuat pohon permasalahan terlebih dahulu, menentukan sasaran dan evaluasi sasaran. (Nining I. Soesilo: 2002).

Kerangka Kerja Logis (KKL) Proyek merupakan salah satu peralatan yang digunakan dalam perencanaan dan pemantauan-evaluasi proyek, KKL

berbentuk tabel matriks 4 baris dan 4 kolom (yang dikenal dan digunakan negara donor internasional) atau 5 baris dan 4 kolom (yang digunakan oleh Bappenas;1996).

KKL dibuat ditahap awal suatu perencanaan proyek mengenai latar belakang pemikiran tentang apa harapan-harapan yang akan dicapai dalam setiap tahapan proyek sehingga dapat mempertajam logika perencanaan proyek bersangkutan pada setiap tingkatan tujuannya serta perkembangan evaluasinya bila proyek tersebut telah dilaksanakan.

KKL dapat dipakai untuk menilai proyek pada setiap setiap tahap proyek, yaitu tahap perencanaan (*ex-ante = appraisal*), tahap pelaksanaan (*on-going evaluation*) dan tahap selesainya proyek (*ex-post evaluation*). Penyusunan KKL mencakup :

1. Menentukan masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak proyek dalam suatu indikator dan sasaran kinerja;
2. Menentukan indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian setiap tujuan secara kuantitatif;
3. Hubungan kausal (*means-end*) antara indikator-indikator tersebut;
4. Asumsi-asumsi yang mengikuti tujuan di setiap tingkatan, yaitu faktor-faktor luar (eksternal) yang tidak dapat dikontrol oleh proyek, tetapi dapat mempengaruhi tercapainya tujuan proyek dan hubungan antara masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Kerangka Kerja Logis dalam tabel matriks secara umum memiliki struktur sebagai berikut :

**A. Logika Vertikal** (dibaca dari baris bawah ke atas)

Baris I : masukan dan kegiatan.

Informasi mengenai rincian kegiatan proyek dan segala sesuatu yang dibutuhkan (dana, sumberdaya manusia dan faktor produksi lainnya) untuk menghasilkan keluaran.

Baris 2 : keluaran.

Hasil spesifik yang diharapkan langsung dari pelaksanaan kegiatan proyek, baik fisik maupun non fisik.



Baris 3 : Hasil.

Informasi mengenai latar belakang diproduksinya output. Menunjukkan fungsi langsung yang diharapkan dari keluaran setelah pelaksanaan proyek selesai.

Baris 4 : Manfaat.

Hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, tepat waktu).

Baris 5 : sasaran/dampak.

Informasi yang menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya proyek. Menggambarkan aspek makro proyek, tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional.

#### **B. Logika Horisontal** (dibaca dari kolom kiri ke kanan)

Logika horisontal yang dibaca dari kolom ke kolom menunjukkan ukuran kegiatan proyek yang berhubungan dengan tujuan proyek disemua tingkatan indikator dan sasaran kinerja.

Kolom 1 : Ringkasan Narasi (*Narrative Summary*).

Penjabaran proyek dan tujuannya di semua tingkatan secara kualitatif.

Kolom 2 : Rincian indikator dan sasaran kinerja secara kuantitatif (*Objectively Verifiable Indicators-OVI*).

Menunjukkan indikator-indikator yang menjelaskan secara kuantitatif hasil yang ingin dicapai pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja.

Kolom 3 : Alat penjelasan dan pembuktian (*Means of Verification-MOV*).

Alat/sumber informasi/data yang digunakan untuk menjelaskan indikator dan sasaran kinerja pada kolom 2.

Kolom 4 : Asumsi-asumsi terpenting (*Important Assumptions*).

Asumsi-asumsi terpenting yang mengikuti tujuan di setiap tingkatan. Merupakan faktor-faktor eksternal (di luar kontrol pengelola proyek) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan indikator dan sasaran kinerja disemua tingkatan. Apabila hasil proyek tidak sesuai dengan rencana, maka penilai dapat meneliti kolom 4, apakah asumsi yang diperkirakan dalam perencanaan

terpenuhi atau tidak. Penentuan asumsi harus dilakukan dengan cermat, karena hanya asumsi terpenting saja yang layak dicantumkan.

Oleh karena itu, dengan menggunakan KKL, kita dapat melihat konsistensi hirarki dari proses pembangunan proyek sejak memasukkan *input* sampai sasaran yang diharapkan terjadi, sehingga evaluasi yang akan dilaksanakan adalah dengan melihat kesesuaian antara KKL yang disusun dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Untuk KKL Evaluasi akan digunakan format 5 baris 5 kolom dimana kolom terakhir berisikan deskripsi hasil evaluasi.(Suyanti:1997).

#### **4.6 Ruang Lingkup**

Penelitian dilakukan di Kota Payakumbuh, terhadap Program Penyaluran Dana Bergulir Usaha Mikro untuk pengusaha sektor industri skala kecil dan mikro khususnya industri pangan yang memperoleh penyaluran dana bergulir mikro. Periode waktunya dibatasi tahun 2008-2009. Penelitian dilakukan selama tiga bulan yaitu dari bulan juni sampai bulan Agustus 2010.